

DISERTASI

**HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**

*THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA ON
PERSPECTIVE OF DEMOCRACY*



Oleh :

NANY SURYAWATI

NIM : 03.102.0.0243

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

DISERTASI

**HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI**

*THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA ON
PERSPECTIVE OF DEMOCRACY*



Oleh :

NANY SURYAWATI
NIM : 03.102.0.0243

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

DISERTASI

HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

*THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA ON
PERSPECTIVE OF DEMOCRACY*

Oleh:

NANY SURYAWATI
NIM : 03.102.0.0243

Disusun Untuk Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Hukum (S3)
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Telah disetujui :
Pada Tanggal, 28 Juli 2017**

Prof. Dr. Made Warka, SH, M.Hum
Promotor

Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., MH
Ko Promotor

The block contains two handwritten signatures. The top signature is in dark ink and appears to be 'Made Warka'. The bottom signature is in a lighter, more stylized ink and appears to be 'Soetanto Soepiadhy'. Both signatures are written over a dotted line.

Mengetahui :
Ketua Program Studi Doktor Hukum

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to Dr. Endang Prasetyawati, is written over a dotted line.

Dr. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum

HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI

*THE WOMEN'S POLITICAL RIGHTS IN INDONESIA ON
PERSPECTIVE OF DEMOCRACY*

Oleh :

NANY SURYAWATI
NIM : 03.102.0.0243

Telah diuji dan direvisi didepan Tim Penguji pada Ujian Tertutup Disertasi
Program Doktor Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal , 22 Juli 2017

TIM PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH, MH

Anggota : Prof. Dr. Made Warka, SH, M.Hum

Dr. Soetanto Soepiadhy, SH., MH

Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH, MH, MM.

Dr. Otto Yudianto, SH, M.Hum

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum.

Dr. H. Slamet Suhartono, SH, MH

Sk Rektor Nomor : 95/DIH-FH/VII/2017.

Tentang : Pengangkatan Panitia Ujian Tertutup Disertasi
Program Doktor Hukum (S3) Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Tanggal 13 Juli 2017



KATA PENGANTAR

Puji syukur haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNYA saya dapat menyelesaikan penyusunan Disertasi dengan judul “HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI ” ini, dengan melalui beberapa kali perubahan, akan tetapi menurut hemat saya tetap tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari sempurna.

Berbagai kendala dan kesulitan telah dialami dalam rangka penyusunan disertasi ini, oleh karena itu saran maupun kritikan yang konstruktif sangat dibutuhkan. Semoga dengan ide yang tertuang dalam disertasi ini dapat diterima bahkan dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat memberikan manfaat, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan masyarakat serta demi perkembangan Negara Indonesia.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan saya menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Prof. Dr. Made Warka SH., M.Hum. Selaku Promotor yang telah dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan disertasi ini.

Dr. Soetanto Soepiadhy SH., MH. Selaku Co-Promotor yang telah dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, kritik, saran dan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan disertasi ini.

Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945, yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang juga berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yang disela-sela kesibukannya masih sempat memberikan berbagai informasi, semangat dorongan dan motivasi yang sangat berharga bagi saya dalam menyelesaikan studi doktor (S3).

Para dosen yang mengajar di Pogram Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, khususnya Dr. H. Slamet Suhartono SH., MH.; Dr. Hufon, SH., MH., yang telah memberikan pengarahan dan motivasi dalam proses pendidikan dan penyelesaian disertasi.

Teman kuliah Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang: Dr. Suratman, SH., MH.; Dr. Hermawan SH., MH.; Tutiek Retnowati SH., MH., yang telah tanpa henti memberikan motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.

Rektor Universitas Katolik Darma Cendika, Wakil Rektor I dan II Universitas Katolik Darma Cendika, Rekan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, yang telah memberikan dorongan moril dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan disertasi ini.

Almarhum suami tercinta, Yohanes Aloysius Hartono, S.H., yang memberikan izin kepada saya untuk menempuh studi lanjut di Strata 3 ini.

Anak-anak saya yang tercinta: Maria Clara Haryani Jelita Suryadewi, SE.; Yohanes Petrus Hartomo Budiman Suryadiningrat, ST.; Yohanes Paulus Haryadi Kusuma Ariodiningrat, S.Farm, Apt.; Yohanes Christian Harditya Rachmat Cakradiningrat, serta menantu perempuan yang terkasih: Yuan Arissa Adorian, A. Md, Ak.; Katarina Lidya Christanti, S.Sn. yang telah memberikan dukungan semangat; serta cucu tercinta: Arsyandendra Ryuga Suryadiningrat dan Jordan Lyanna Ariodiningrat yang telah memberikan hiburan pada saat saya berada dalam kejenuhan, serta keponakan yang tersayang Handi Yanuar, S.Kom., yang banyak membantu dalam proses akhir disertasi ini.

Para staff karyawan di lingkungan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah banyak memberikan bantuan layanan administrasi selama saya menjadi mahasiswa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua.

Surabaya, Juli 2017

Nany Suryawati

RINGKASAN

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penegasan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu, dalam setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan atas hukum, dengan demikian hukum mempunyai kedudukan tertinggi dalam pemrintahan Negara Republik Indonesia. Atas dasar itu, dalam Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak asasi politik tiap warga negara. Hakekat hak asasi politik adalah hak asasi yang mendasar dan melekat pada tiap individu, dan tidak membedakan manusia, baik dari suku, ras, agama, maupun jenis kelamin. Berdasarkan hal ini, maka harus dipahami bahwa hak asasi tiap warga negara adalah sama, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Setiap negara yang berdasarkan hukum adalah Negara Hukum dan berasaskan demokrasi, dengan kedaulatan ditangan rakyat, seluruh peraturan perundang-undangan harus dan wajib mendahulukan kepentingan rakyat, termasuk perlindungan dan jaminan untuk pemenuhan hak asasi tiap warga negara, khususnya hak asasi politik bagi perempuan, karena perempuan bukanlah warga negara kelas dua, tetapi mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, di Negara Hukum Republik Indonesia termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, yang menyatakan tentang persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan pemikiran ini, maka penulis mengkaji permasalahan yang ada, dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia secara normatif telah terpenuhi?
2. Bagaimana perkembangan hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak warga negara dalam perspektif demokrasi?

Permasalahan ini diurai dan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian juridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan hukum positif, yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, di samping itu juga menggunakan data yang ada di dalam kenyataan untuk mendukung analisa tersebut, dengan melakukan berbagai pendekatan antara lain :

1. pendekatan filosofi;
2. pendekatan konseptual;
3. pendekatan perundang-undangan ;dan
4. pendekatan perbandingan.

Landasan teori yang dipergunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori NegaraHukum;
2. Teori Konstitusi;
3. Teori Demokrasi; dan

4. Teori Keadilan.

Di samping itu juga menggunakan beberapa konsep, yaitu :

1. Konsep Hak Asasi Manusia;
2. Konsep Perempuan ;dan
3. Konsep Feminisme.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab I, II dan III, berikut ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Suatu Negara Hukum yang mengakui hak asasi warga negaranya yang merupakan hakekat sebenarnya dari hak asasi manusia yang melekat pada tiap individu, tanpa ada diskriminasi baik dari suku, ras, agama dan jenis kelamin, haruslah termaktub dalam pasal-pasal di Undang Undang Dasar atau Konstitusi yang tertulis dalam negara itu, berdasarkan teori Negara Hukum dan Konstitusi serta konsep Hak Asasi Manusia, dan juga dalam instrument hukum di dunia internasional, sehingga memberikan landasan yang kuat bagi perempuan untuk memperjuangkan pemenuhan hak asasi politik mereka, walaupun ada beberapa faktor (faktor budaya, faktor politis, internal individu perempuan) yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak tersebut.
2. Pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan ini melalui proses yang memakan waktu, dengan pergerakan perjuangan perempuan (*affirmative action*) tidak saja di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara di dunia, sehingga hak asasi politik perempuan khususnya hak untuk dipilih dan memilih, yang mengalami peningkatan secara bertahap, melalui berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung perjuangan ini, sekaligus mengatasi kendala yang ada, dalam bingkai kedaulatan rakyat dan demokrasi, agar terjadi percepatan peningkatan secara signifikan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada :

1. Kelompok-kelompok perempuan, untuk melakukan peningkatan kualitas diri sehingga dapat bersaing secara terbuka dengan kaum laki-laki, dengan melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra untuk mendukung pergerakan perempuan ini;
2. Pemerintah, agar segera melakukan berbagai program kegiatan, terutama dalam sosialisasi pemahaman asas demokrasi, sehingga faktor-faktor yang menjadi kendala dapat di minimalisir, sehingga pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan dalam perspektif demokrasi dapat terwujud dalam kenyataannya.

ABSTRACT

The provision of Article 1 Clause (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is an affirmation that the State of the Republic of Indonesia is a State of Law, therefore, in every act of government and citizens must be based on law, thus the law has the highest position in the State administration. On that basis, the Constitution of the Republic of Indonesia provides recognition, protection and guarantee of the fulfillment of human rights, including the political rights of every citizen. The nature of political rights is a fundamental and inherent right of each individual, and makes no distinction between human beings, whether of ethnicity, race, religion or gender. Based on this, it must be understood that the human rights of every citizen are equal, both the right to vote and the right to be elected. Every country based on law is a State of Law and based on democracy, with sovereignty in the hands of the people, all laws and regulations must and must prioritize the interests of the people, including protection and guarantee for the fulfillment of the human rights of every citizen, especially the women's political rights and the women is not a second class citizen, but has the same status as men, in the State of the Republic of Indonesia contained in Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states about equality before the law.

The problem formulated in this research is 2 (two) things, that is related to the theory and the concept about justice and equality, is about fulfillment of the women's political rights, and how the progress of manifestation of the rights of citizens in a perspective of democracy.

Based on the research and analysis and discussion that has been done in Chapter I, II and III, the following is stated conclusion that an answer to the problems in this study, as follows: to give the foundation for women to fight for the fulfillment of their political rights, especially the women's political rights and that's is a answer about popular sovereignty and democracy in a State of Law.

Keyword : Constitution, Democracy, Human Rights, Women's Political Rights

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT GELAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Orisinalitas Penelitian	15
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	15
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian	18
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	20
1.6.1. Landasan Teori	20
1.6.1.1. Teori Negara Hukum	20
1.6.1.2. Teori Konstitusi	31
1.6.1.3. Teori Demokrasi	37
1.6.1.4. Teori Keadilan	39
1.6.2. Penjelasan Konsep	46
1.6.2.1. Konsep Hak Asasi Manusia	46
1.6.2.2. Konsep Perempuan	47
1.6.2.3. Konsep Feminisme	49
1.7. Metode Penelitian	55
1.7.1. Jenis Penelitian	55
1.7.2. Pendekatan Masalah	56
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	57
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	58
1.7.5. Analisis Bahan Hukum	59
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika	59
 BAB II: HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN	
 DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI	
 MANUSIA	61
2.1. Hak Asasi Politik Sebagai Hak Asasi Manusia	61
2.1.1. Hakekat Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum	61
2.1.2. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia	66

2.1.3. Instrumen dan Prosedur Internasional Untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia	78
2.1.4. Hakekat Hak Asasi Politik.....	90
2.1.5. Hak Asasi Politik Dalam Instrumen Internasional.....	95
2.1.6. Hak Asasi Politik di Indonesia.....	97
2.1.7. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia Setelah Reformasi.....	101
2.2. Hak Politik Perempuan Setelah Amandemen UUD 1945.....	107
2.3. Pemenuhan Hak Asasi Politik Perempuan Di Indonesia.....	118

BAB III: HAK ASASI POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA

DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI	124
3.1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen	124
3.1.1. Hakekat Keterwakilan.....	124
3.1.2. Persebaran Keterwakilan Perempuan di Parlemen DPR-RI ...	131
3.1.3. Persebaran Keterwakilan Perempuan Pada Fraksi di DPR.....	134
3.1.4. Persebaran Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Pada Daerah Pemilihan	136
3.1.5. Persebaran Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	140
3.1.6. Persebaran Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Beberapa Kabupaten/ Kota.....	142
3.1.7. Rasio Perbandingan Antara Laki-Laki dan Perempuan di Komisi- Komisi DPR-RI	144
3.2. Hak Politik Perempuan di Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945	146
3.3. Kuota Keterwakilan Perempuan 30% Dalam Parlemen.....	152
3.3.1. Urgensi Penetapan Kuota 30% (Tiga Puluhan Persen) Keterwakilan Perempuan di Parlemen	152
3.3.2. Keterwakilan Perempuan di Parlemen Sebagai Upaya Pemajuan Demokrasi di Indonesia	156
3.3.3. Keterwakilan Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No:22-24/PUU-VI/2008.....	164
3.4. Dasar Pertimbangan Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan	174
3.4.1. Landasan Filosofis	174
3.4.2. Landasan Yuridis Konstitusional.....	178
3.4.3. Landasan Politis	182
3.4.4. Landasan Sosiologis.....	188
3.5. Segi Positif Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan	189
3.6. Segi Negatif Penetapan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan.....	191
3.7. Dinamika Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia.....	194
3.7.1. Perkembangan Keterwakilan Perempuan Dalam Periodisasi Pemilihan Umum.....	194
3.7.2. Perkembangan Prosentase Keterwakilan Perempuan Di	

Parlemen Dalam Periodisasi Pemilihan Umum di Indonesia.....	197
3.8. Akibat Rendahnya Keterwakilan Perempuan Di Parlemen.....	201
3.9. Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan.....	204
3.9.1. Faktor Budaya.....	204
3.9.2. Sistem Kekerabatan.....	207
3.9.3. Transparansi Dalam Pengambilan Keputusan Daftar Calon.....	208
3.9.4. Faktor Internal Individu Perempuan.....	210
3.9.5. Faktor Politis.....	215
3.10. Kesetaraan Hak Asasi Politik Perempuan di Negara Lain.....	216
3.10.1. Perjuangan Perempuan di Iran.....	218
3.10.2. Perjuangan Perempuan di Uni Eropa.....	232
3.11. Upaya-upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Menggunakan Hak Politiknnya.....	233
3.11.1. Kebijakan Affirmative Action.....	233
3.11.2. Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan.....	248
BAB IV: PENUTUP.....	252
4.1 Kesimpulan.....	252
4.2 Saran.....	253
DAFTAR BACAAN.....	254

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Hak asasi politik perempuan di Indonesia secara normative telah terpenuhi. Hal ini tercermin dalam pengaturannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dimulai dari pengaturannya dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber tertib hukum nasional tertinggi sampai dengan undang-undang di bidang politik, khususnya terkait dengan hak dipilih dan memilih di dalam pemilihan umum. Undang-undang di bidang politik tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tanpa ada diskriminasi baik dari suku, ras, agama dan jenis kelamin, termaktub dalam pasal-pasal di Undang Undang Dasar dan undang-undang bidang politik.
2. Perkembangan Pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan ini melalui proses yang memakan waktu, dengan pergerakan perjuangan perempuan (*affirmative action*) tidak saja di Indonesia, bahkan juga di beberapa negara di dunia, sehingga hak asasi politik perempuan khususnya hak untuk dipilih dan memilih, yang mengalami peningkatan secara bertahap, melalui berbagai upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung perjuangan ini, sekaligus mengatasi kendala yang ada, dalam bingkai kedaulatan rakyat dan demokrasi, agar terjadi percepatan peningkatan secara signifikan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada :

1. Kelompok-kelompok perempuan, untuk melakukan peningkatan kualitas diri sehingga dapat bersaing secara terbuka dengan kaum laki-laki, dengan melibatkan kaum laki-laki sebagai mitra untuk mendukung pergerakan perempuan ini;
2. Pemerintah, agar segera melakukan berbagai program kegiatan, terutama dalam sosialisasi pemahaman asas demokrasi, sehingga faktor-faktor yang menjadi kendala dapat di minimalisir, sehingga pemenuhan hak asasi politik bagi perempuan dalam perspektif demokrasi dapat terwujud dalam kenyataanya.

DAFTAR BACAAN

PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Disertasi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alexander, Hary, *Panduan Perancangan Undang Undang Di Indonesia*, XSYS Solusindo, Jakarta, 2004.
- Ali, Zaenudin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Faried., Nurlina Muhidin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Alkotsar, Artidjo, *Human Right Court, Indonesia and Civilization*, Pusham UII, Yogyakarta, 2003.
- Arief, Fakhrulloh, Zudan dan Supardan Modeong, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, Perca, Jakarta, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- _____, 2006, *Perihal Undang Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, KRHN-NKRI, Jakarta.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Cetakan Kedua, Jakarta Barat, 2008.
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Attamimi, Hamid. S., *Peranan Keppres Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Fungsi Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I Sampai dengan Pelita IV)*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan Penegakannya Di Indonesia*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.
- _____, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, Apeldoorn, 1976, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- Azhary, Muhamad Tahir, *Menemukan Demokrasi*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2005.
- _____, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2003.
- _____, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1999.
- _____, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Baehr, Peter R., *Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Bago, Rony Sautama Hotma, *Pengantar Pembentukan Undang Undang Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Bahar, Saafroeddin, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar HJaraon, Jakarta, 2002.
- Basah, Sjachran, 1997, *Ilmu Negara (Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Berting, Jan, 1990, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collective Rights*, First Edition, Mechler, London,
- Bolker, Ed.D, Joan, 1998, *Writing Your Dissertation in Fifteen Minutes A Day*, New York United State.
- Bramantyo, et.all, tanpa tahun, *Demokrasi dan Civil Society*, Institute for Research and Empowerment, Yogyakarta.

- Bhakti Ardhiwisastra, Yudha, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
- Bruggink, J.J.H., 1998, *Refleksi Tentang Hukum*, (Alih Bahasa oleh Arief Sidharta), Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Brownlie, Ian (ed), 1971, *Basic Documents on Human Rights*, Clarendon Press, Oxford
- _____, 1993, *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, (terjemahan Beriansyah), UI Press, Jakarta.
- Budi, Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 1997, *Hak Asasi Manusia*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, Penebar Swadaya, Jakarta.
- _____, 1981, *Partisipasi dan Peran Politik - Sebuah Bunga Rampai*, Gramedia, Jakarta.
- Burhan, Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Disertasi Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Burns, Peter, J, 1999, *Leiden Legae Concepts of Law in Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Buyung Nasution, Adnan, et all, 2006, *Instrumen internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- _____, 2009, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal Atas Konstituante 1956 - 1959*, IKAPI, Jakarta.
- Cavendish Law cards, 1998, *Jurisprudence*, Cavendish Publishing Limited.
- Cora, et all, 2002, *The New Constitutional and Administrative Law*, Volume II Administrasi Law, Editor, IAIN CURRIE.
- Cotterrel, Roger, 1994, *The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy*, University of Pennsylvania Press, Second Paper Back Printing, Philadelphia.
- Dahlan, Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Dalijo, J.B. dkk, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, PT Gramedia, Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Dasuki, Hafids, H.A., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru van Hoeve, FK-IMA, Jakarta.
- Darmodihardjo, Dardji, dan Shidarta , 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Davidson, Scottt, 1994, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Durkheim, R.C.E, 1999, *Law in a Moral Domain*, Stanford University Press.
- Duswara, D., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung.
- Dwiyanto, A, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Effendi, Masyhur, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- El - Muhtaj, Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Predana Media Group, Jakarta.
- Fadjar, Mukhtie, H.A, 2005, *Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- _____, 2008, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, In-Trans Publishing, Malang
- _____, 2001, *Politik Hukum, Pembaharuan Hukum, Pembangunan Hukum*, Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- _____, 2002, *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Fakrullah, Z.A., 2003, *Arah Politik Hukum Pengembangan Kawasan Perekonomian Terpadu Dalam Era Otonomi Daerah*, Legality, Jakarta.

- Farida, Indriati Soeprapto, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-undangan I (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta.
- _____, 2007, *Ilmu Perundang-undangan II (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jakarta.
- Fatmawati, 1996, *Hak Menguji Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fatkhurohman, 2004, *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fletcher, George P, 1996, *Basic Concept of Legal Thought*, Oxford University Press.
- Fredrick Malt, Gert, 1992, *Coheren And Conflict Law*, Kluwer Law and Taxation Publishers Deventer, Boston, Amsterdam.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2007, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Gadjong, A.A., 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gaharpung, Marianus J, 2004, *Hukum Dalam Dinamika Masyarakat*, CV Citra Media, Sepanjang, Surabaya.
- Geoffrey, Rivlin, 2004, *Understanding The Law*, Oxford University Press inc, New York.
- Glendon, Mary Ann, 2001, *A World Made New Eleanor Roosevelt and The Universal Declaration of Human Rights*, Random House Inc, New York.
- Goesniadhie, K, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, Temprima Media, Surabaya
- Giat Wahyudi, 2009, *Menata Kembali Konstitusi Indonesia*, Kaukus Parlemen Pancasila DPR-RI dan Yayasan Ayo Bersatu, Jakarta.
- Gautama, Sidharta, 1991, *Essay In Indonesian Law*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya.

_____, 2001, *Sistem Pembagian kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Yuridika, No.6 /Tahun XVI, Universitas Airlangga, Surabaya.\

_____, dkk, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik*, Yuridika No.6 /Tahun IX, Universitas Airlangga, Surabaya.

_____, 1998, *Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

_____, & Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

_____, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, M2 Print, Surabaya.

_____, 2005, *Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Sui Generis*, FH Unair, Surabaya.

_____, 1992, *Lembaga Tertinggi Dan Lembaga – Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang Undang Dasar 1945 (Suatu Analisis Hukum dan Kenegaraan)*, Bina Ilmu, Surabaya.

Hamdan, M, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mnadar Maju, Bandung.

Hamidi, J, 2005, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

Hamidi, Jazim dan Malik, 2009, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Harriss, John, 2005, *Politisasi Demokrasi - Politik Lokal Baru*, Demos, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung

- Haryono, 2009, *Konstitusi Dan Pembangunan Daerah*, MKRI, Jakarta.
- _____, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- Harahap, Bazar, & Nawangsih Sutardi, 2008, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV Yani's, Jakarta.
- Held, D., 2004, *Demokratisasi dan Tataan Global. Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judisial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII, Yogyakarta.
- Humphrey, John P, 1984, *Human Rights and The United Nations: a Great Adventure*, Dobbs Ferry, Transnational Publisher, New York.
- Husin, HM.Wahyudi & Hufron, 2008, *Hukum, Politik dan Kepentingan*, Lakesbang PRESSSindo, Yogyakarta.
- Ibrahim, Jhony., 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ismatullah, Deddy, & Asep A. Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif (Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama)*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Jimung, M, 2005, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta.

Joeniarto, 1991, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Juliantara, Dadang, 1998, *Meretas Jalan Demokrasi*, Kanisius, Jakarta.

_____, 1999, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T, 1987, *Hukum Tata Negara RI*, Bina Aksara, Jakarta.

_____, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif, Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, terjemahan Nurulita Yusron, Nusa Media, Bandung.

_____, 2008, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Jakarta.

Karim, Rusli, 1991, *Pemilu: Demokrasi Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Koeswahyono, Imam, 2014, *Sosiolegal - Bekal, Pengantar dan Substansi Pendalaman*, Intimedia, Malang.

Kusnardi, Moh, & Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sastra Hudaya, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Jakarta.

Kusuma, Candra, 2013, *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Epistema Institute, Jakarta.

Kurnia, Mahendra Putra, 2011, *Keadilan Di Tanah-Tanah Perbatasan*, Intrans Institute, Malang.

Legowo, TA dan J, Soedjati Djiwandono, 1996, *Revitalisasi Sistem Politik*, Centre For Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta

Levin, Leah, 1993, *Human Rigjts, Question and Answer*, National Book Trust, India,

- Lubis, Solly, M, 1992, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Laboratorium Pancasila UM, 2009, *Memorandum Nasional (Kajian Normatif - Kritis: Masalah Fundamental Nasional Yang Menggugah Nurani Bangsa)*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Lembaga Nasional untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia: *Lembar Fakta 19* Komnas HAM & British Council - Jakarta - 2000.
- Less, John D, & Malcolm Shaw, 1979, *Committee In Legislatures: A Comparative Analysis*, Doha University Press, Durham, North Caroline , USA.
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, PSKN-HTN, FH UNPAD, Bandung.
- _____, 2001, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Machmud, Amir, 1984, *Demokrasi, Undang Undang dan Peran Rakyat*, PRISMA, LP3ES, Jakarta.
- Mahasin, Aswab, 1984, *Negara dan Kuasa*, PRISMA, LP3ES, Jakarta.
- M.D.,Mahfud, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2008, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, MKRI, Jakarta.

- _____, 2009, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- _____, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- _____, Jazim Hamidi, dkk, 2010, *Constitutional Question (Alternatif Baru Pencari Keadilan Konstituisional)*, UB Press, Malang.
- , 1993, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marsono, 2002, *Susunan dalam Satu Naskah UUD 1945 dengan Perubahan-perubahannya (1999 – 2002)*, Eka Gaya, Jakarta.
- Martus, Julie dkk, 2001, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah demi Langkah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2005, *Penelitian Disertasi Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum - Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- Marbun & Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Masyhur, Effendi, 2002, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno & A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Muchsin, 2005, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng, 2001, *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*, Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muladi (ed), 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.

Mustafa, Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 1985, *Sistem Hukum Indonesia*, Ramadja Karya, Bandung.

Masyhur, Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Meuwissen, D.H.M., 2001, dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Moehlas, Moersidin, 2007, *Pancasila Pola Dasar Ketatanegaraan Indonesia & Amandemen UUD 1945*, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Nalle, Victor, I.W, 2010, *Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif*, UB Press, Malang.

Nickel, James W, 1996, *Hak Asasi Manusia Refelksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, terjemahan Gramedia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Noer, Deliar, 1983, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*, Cetakan I, CV Rajawali, Jakarta.

Nonet, Philippe dan Zelsinck, Philip, 2003, *Hukum Responsif*, Penerjemah Masud, HuMa, Jakarta.

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, 2009, *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan & Keadilan Gender*, LPP & UNS Press, Surakarta.

Palmer, Richard E, 2003, *Hermeneutika: Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____, 2005, *Arti Penting Hermeneutika Dalam Penerapan Hukum*, Unair, Surabaya.

Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) - Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Perserikatan Bangsa Bangsa, 1963, *Suatu Ukuran Kemajuan (Pernyataan Umum Hak-Hak Manusia)*, New York.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984, *Euthanasia - Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Balai Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 2001, *Sosialisasi, Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pudjiarto, 1999, *Harum, Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1979, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Purnomosidi, Arie, dan Prasetyo, 2014
- Pusat Hak Asasi Manusia PBB, 2000, *Institusi Nasional Hak Asasi Manusia: Buku Pedoman Pembentukan dan Penguatan Institusi Nasional untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Pusat hak Asasi Manusia PBB, Jakarta.
- Puntsch, Eberhard, 1996, *Politik dan Martabat Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia Dalam Ajaran Hukum Demokrasi*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2009, *Hukum Progresif - Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranadireksa, Hendarmin, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Fokus Media, Bandung.

- Ranawijaya, Usep, 1983, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Rasyid, M Ryaas, 2002, *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*, Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (Puskap) & Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Jakarta,
- Ridwan, H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riyadi, Eko & Supriyanto Abdi (ed), 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak asasi Manusia Kajian Multi Prespektif*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhratara karya Aksara, Jakarta.
- Rousseau, J.J., 1983, *Du Contract Social ou Principes du Droit Politique* (1762), didalam L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rudy T. Erwin, 1990, *Tanya Jawab Filsafat Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim, HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Perdana, Jakarta.
- Sarundayang, 2001, *Arus Balik Kekuasaan Ke Daerah*, Pusat Studi Harapan, Jakarta.
- Schmidhauser, John R, 1962, *Constitutional Law In The Political Process*, Rand M. Nally & Company, Iowa, US A.
- Sidharta, Arief, Bernard, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (terjemahan dari JJH Bruggink), Mandar Maju, Bandung.
- Sinaga, Budiman NPD, dan Jazim Hamid, 2005, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Sorotan*, Cetakan ke I, PT Tatanusa, Jakarta,
- Scholten, Paul, 2003, *Struktur Ilmu Hukum*, terjemahan Alumni, Alumni, Bandung.
- Sekjen MPR-RI, 2013, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara*, MPR-RI, Jakarta.

- Sidharta, Arief., Bernard, 2001, *Reflektif Tentang Struktur ilmu Hukum*, (terjemahan dari JJH Bruggink), Mandar Madju, Bandung.
- Simorangkir & Woeryono Sastropranoto, 1961, *Peladjaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Singomakuto, Djamaludin D, dan Wiratmo, 1980, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Cetakan Kelima, Jakarta
- Slamet Kurnia, Titon, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Stockmann, Petra, 2007, *The New Indonesian Constitutional Court*, Hanna Seidel Foundation, Jakarta.
- Soegianto, Djoko, 2002, *Kondisi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini*, Diseminasi Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Bidang Pendidikan, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Departemen Pendidikan nasional, Jakarta.
- Soemantri, Sri, Martosoewignjo, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Kosntitusi*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- _____, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Soepiadhy, Soetanto, 2008, *Meredesain Konstitusi - Pembangunan Seorang Anak Bangsa Untuk Demokrasi*, Burungmerak Press, Jakarta.
- , 2015, *Kesabaran Revolusioner - Merebut Masa Depan Indonesia*, Lembaga X-ist, Surabaya.
- Soeteman, Arend, 2001, *Pluralism and Law*, Kluwer Academi Publisher, London.
- Soetandyo, 1997, *Hak Asasi Manusia*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Penebar Swadaya, Jakarta.

- Strong, C.F. 1975, *Modern Political Constitution An Introduction to the Comparative Studi of their History and Existing Form*, Sidwick & Jackson Ltd, London.
- Sunarto, dan Bambang Arumanadi, 1990, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Subekti, Valina Singka, 2008, *Menyusun Konstitusi Transisi, Pergulatan Kepentingan Dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syarifudin, Ateng, 1983, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Ilmiah Disampaikan Pada Dies Natalis - Universitas Parahyangan, Bandung.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2004, *Hukum Konstitusi, Prosedur dan Perubahan UUD 1945 Di Indonesia 1945 - 2002 serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain di Dunia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soetiksno, 2008, *Filsafat Hukum - Bagian I*, Pt. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tahib, Dahlan, dkk, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Talib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tedjonagoro, Hendy, 2004, *Gerakan Multiethnis Menuju Masyarakat Berbudaya (Civil Society) Ke Negara Beradab (Culture State)*, Laras Printing, Surabaya.
- Triana Budiarti, Rita, 2010, *On The Record, Mahmud MD Di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Utrecht & Moh. Saleh Djindang, 1982, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Wahyudi, Alwi, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia - Dalam Perspektif Pancasila Pasca Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yasir, Alinmi, dkk, 1999, *Advokasi Hak-Hak Perempuan*, LKis, Yogyakarta.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Fair Trial, 1997, *Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Jujur Dan Tidak Memihak*, Editor Munir, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda Dilanggar*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

Yuwono, Abdy, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokusmedia, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang keterwakilan perempuan dalam Komisi Pemilihan Umum

Perjanjian Internasional

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia - 1948

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik - 1966

Deklarasi Vienna dan Program Aksi Juni - 1993

Konferensi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Jakarta - 1997

Lembaga Nasional untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia:
Lembar Fakta 19 Komnas HAM & British Council - Jakarta - 2000.

JURNAL

Jurnal Perempuan NO 63, 2009, *Peningkatan Keterwakilan Perempuan: Keniscayaan Untuk Sebuah Perubahan* (Nia Sjarifudin)

Jurnal Perempuan No 64, 2009, *Feminisme dan Partisipasi Laki-Laki*, (Rocky Gerung)

Jurnal Hukum, Edisi 3 Tahun II, November 2004, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, Dalam Jentera, Rule of Law*, Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK), (B. Arief Sidharta)

Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 2, Jakarta April 2011, *Vonis Mahkamah Konstitusi Mengeksaminasi Keterwakilan Perempuan*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, (Mohamad Faisol)

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Jakarta Desember 2014, *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008*, (Nalom Kurniawan)

Makalah

Asshiddiqie Jimly, 1999, *Konstitusi Sebagai Landasan Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis*, Makalah Seminar.

_____, 1999, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis (Pokok Pokok Pikiran Tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945)*, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.

_____, 2005, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Materi pada acara Studium General: *The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta.

_____, 2008, *Konstitusi dan Hak asasi Manusia*, Bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun Kontras, 26 Maret 2008, Jakarta.

_____, 2008, *Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi RI pada Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia "10 Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia"*, 8 Juli 2008, Jakarta.

Bahar, Saafroedin, 2002, *Perspektif Komnas HAM dalam Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah untuk Rapat Koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Departemen Kehakiman dan HAM, 19 Maret 2002, Jakarta

Baramuli, A.A., 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sosial Ekonomi dan Kemamusiaan*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Nasional II tentang Hak Asasi Manusia, 24 – 26 Oktober 1994.

Billah, M.M., 2003, *"Tipologi dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia"*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 14 – 18 Juli 2003, Denpasar.

Effendi, Masyhur, 1993, *Debat Internasional Suatu Langkah Strategik Mensejajarkan Aspek Tanggung Jawab Dalam kerangka Hak Asasi Manusia - Pendekatan Dari Segi Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Soemantri, Sri, 1992, *Perlindungan Hukum Melalui Perlindungan Hak Asasi*. Seminar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Wahyono, Padmo, 1998, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Disertasi

Febrian, 2006, *Hierarkhi Perundang-undangan Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya.

Hasyim, Dardiri, 2010, *Norma Penyelenggaraan Pendidikan Klasikal Berdasar Atas Hak Asasi Manusia*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Hufron, 2012, *Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*, Ringkasan Disertasi, UB Press, Malang.

Susilo, Agus Budi, 2016, *Pembatasan Hak Kasasi dan Konsekuensi Hukm Bagi Pencari Keadilan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Soepiadhy, Soetanto, 2006, *Perubahan UUD 1945 Dalam Prospek Perkembangan Demokrasi*, Disertasi Pasca Sarjan, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar :

- 3.1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen (DPR-RI)
- 3.2. Keterwakilan Perempuan di Fraksi DPR RI (2009)
- 3.3. Keterwakilan Perempuan di DPR RI & DPD RI
- 3.4. Rasio Perempuan & Laki-laki di Komisi-Komisi di DPR RI (2009 - 2014)
- 3.5. Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Sembilan Partai Politik Sebelum Pemilu (2008)

- 3.6. Perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Sembilan Partai Politik Setelah Pemilu (2009)
- 3.7. Data Prosentasi Keterwakilan Perempuan di Jawa Timur
- 3.8. Statistik Keterwakilan Perempuan Kota di Jawa Timur
- 3.9. Perempuan di Kabinet di Indonesia
- 3.10. Perempuan di Pelayanan Publik Menurut Eselon
- 3.11. Perempuan Sebagai Kepala Desa

Tabel:

- 3.1. Keterwakilan Perempuan di DPR dan DPD (2009)
- 3.2. Keterwakilan Perempuan di DPRD Tingkat Propinsi
- 3.3. Keterwakilan Perempuan di Beberapa DPRD Tingkat Kabupaten/Kota Terpilih
- 3.4. Data Prosentasi Keterwakilan Perempuan di Kabupaten dan Kota (8) di Jawa Timur
- 3.5. Perkembangan Keterwakilan Perempuan di beberapa DPRD Tingkat Kabupaten/ Kota Terpilih